



PISAgro



THE FARM

Featured Agriculture Reportings Magazine

EDISI BULAN OKTOBER
OCTOBER EDITION



PESAN DARI DIREKTUR KAMI

Rekan-rekan yang Terhormat,

Kita berjumpa kembali di The Farm edisi Oktober 2022. Kemitraan inklusif menjadi aspek penting untuk mendukung ketahanan ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan, serta meningkatkan keberlanjutan untuk mengurangi jejak karbon dan meminimalkan dampak perubahan iklim.

Pada bulan ini, PISAgro mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dari acara unggulan “Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas”, acara unggulan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2022 di SMESCO Tower, Jakarta.

Dalam buletin ini, kita akan membahas tentang pentingnya kemitraan inklusif untuk meningkatkan UMKM, serta mengenal lebih dekat tentang COY17 dan COP27 yang akan diadakan di Sharm el-Sheikh, Mesir pada November 2022. Pada edisi kali ini, kami juga berkesempatan berbincang dengan Prof. (Riset) Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si., Kepala Badan Litbang, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, untuk mengenal lebih jauh tentang pembentukan Badan Standardisasi Alat Pertanian (Badaristan), standardisasi industri pertanian, dan upaya yang dilakukan untuk menunjang ketahanan pangan dan juga kualitas produk pertanian di Indonesia.

Dari anggota kami, kami mendapat kabar terbaru dari Nestle Indonesia mengenai Nescafe Plan 2030 yang baru diluncurkan sebagai bentuk komitmen mereka untuk mendorong pertanian berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Akhir kata, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan kepada kami, sehingga Sekretariat PISAgro dapat terus menjalankan kegiatan kami. Selamat membaca The FARM edisi kali ini, dan semoga buletin ini dapat menjadi sumber inspirasi baru bagi Anda.

Insan Syafaat
Direktur Eksekutif PISAgro



OPENING REMARKS

Dear Readers,

We meet again in the October 2022 edition of The FARM. Inclusive partnership becoming the important aspect to support economic resilience on facing multiple challenges, as well as enhancing sustainability to reduce carbon footprint and minimising effects of climate change.

In this month, PISAgro was honoured to became part of the flagship event the “Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas” (The Inclusive Partnership Movement for Advancing MSMEs), a flagship event by the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia), which was held on the 3rd of October 2022 at SMESCO Tower, Jakarta.

In this bulletin, we will discuss about the importance of inclusive partnership for improving MSMEs, as well as knowing more about COY17 and COP27 which will be held in Sharm el-Sheikh, Egypt on November 2022. In this edition, we also had the opportunity to talk with Prof. (Riset) Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si., Head of the Research and Development Board, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, to get to know more about the establishment of the Agricultural Instruments Standardisation Board (Badaristan), standardisation of agriculture industry, and its efforts to improving food security and agricultural products in Indonesia.

From our member, we have an update from Nestle Indonesia regarding the newly-launched Nescafe Plan 2030 as their strengthened commitment for driving sustainable agriculture, reduce greenhouse gas emissions and improve farmers' livelihoods.

Finally, we would also like to thank all of you for the support that has been given to us, so that the PISAgro Secretariat can continue to carry out our activities. Happy reading this edition of The FARM, and we hope that this bulletin can be a source of new inspiration for you.

Insan Syafaat

Executive Director of PISAgro



THE FARM

CONTENTS

■ Pesan dari Direktur Kami	I
■ <i>Opening Remarks</i>	II
■ Sorotan PISAgro 2.0	3
■ <i>PISAgro 2.0 Highlights</i>	6
■ Sorotan	9
■ <i>Highlights</i>	12
■ Warta Agro	15
■ <i>Agro News</i>	18
■ Cerita Kelompok Kerja	21
■ <i>Working Group Story</i>	24
■ Fitur	27
■ <i>Feature</i>	29
■ Profil	31
■ <i>Profile</i>	35

CAPAIAN DASBOR PISAGRO 2.0 SAAT INI - OKTOBER 2022

(Disusun oleh Fathan Oktrisaf, Hendri Surya Widcaksana, dan Sandra Pratiwi)

Area Kerja PISAgro



JUMLAH PETANI
1.841.219

JUMLAH DESA
12.796



PISAGRO 2.0 DASHBOARD



27
desa

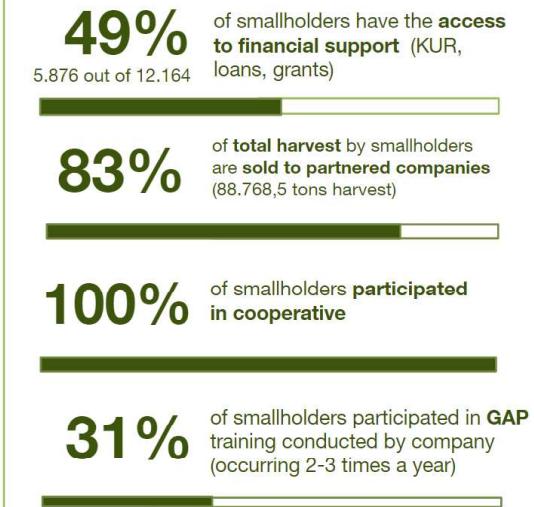
12.164
petani

16.464
ha lahan

OVERVIEW



GROWTH



Smallholders' **average income per month** in each commodities²:

	3.0 Million IDR		2.5 Million IDR
	6.0 Million IDR		3.5 Million IDR

¹ Good Agricultural Practice (GAP) is a guideline commonly used by smallholders to help them implement sustainability practice in agriculture and to ensure the product quality & safety

RESILIENCE



² berdasarkan kondisi data check-up tahunan

SUSTAINABILITY



Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendukung petani dalam implementasi:

Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

9 kampanye	9 sosialisasi	8 pelatihan
----------------------	-------------------------	-----------------------

dilakukan 1 kali setiap tahunnya

Manajemen Limbah

35 kampanye	30 sosialisasi	37 pelatihan
-----------------------	--------------------------	------------------------

dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

Manajemen Biodiversitas

3 kampanye	2 sosialisasi	3 pelatihan
----------------------	-------------------------	-----------------------

dilakukan 1 kali setiap tahunnya

Manajemen Karbon dan Gas Rumah Kaca

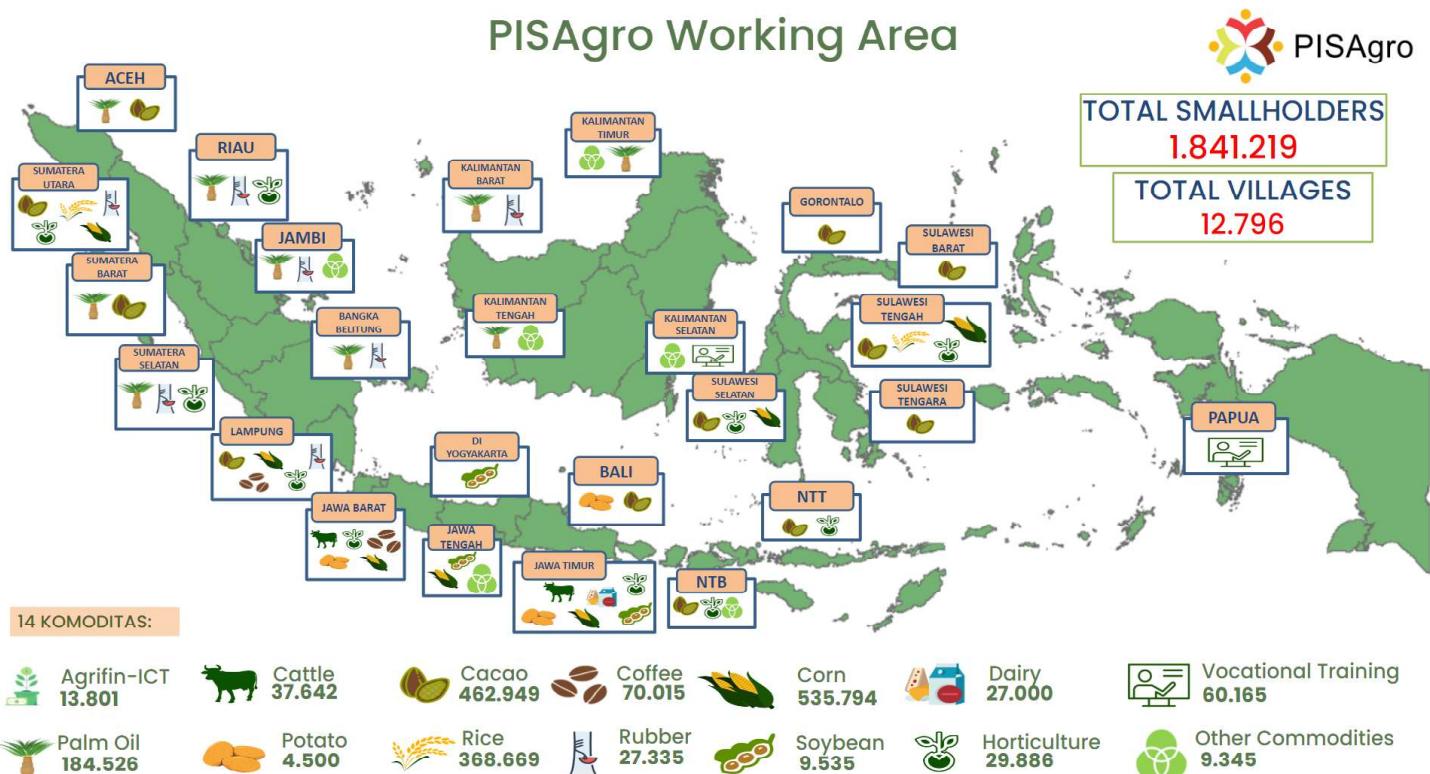
6 kampanye	6 sosialisasi	4 pelatihan
----------------------	-------------------------	-----------------------

dilakukan 1 kali setiap tahunnya

HIGHLIGHTS

ACHIEVEMENT OF THE PISAGRO 2.0 DASHBOARD TO DATE - OCTOBER 2022

(Written by: Fathan Oktrisaf, Hendri Surya Widcaksana, and Sandra Pratiwi)



PISAGRO 2.0 DASHBOARD



27
villages

12.164
smallholders

16.464
ha of farm

HIGHLIGHTS

OVERVIEW



GROWTH

49% of smallholders have the **access to financial support**
5.876 out of 12.164 (KUR, loans, grants)

83% of total harvest by smallholders are sold to partnered companies
(88.768 tons harvest)

100% of smallholders participated in cooperative

RESILIENCE

33%

9 out of 27



at least

1

villages supported by company on their **resilience** capability
health facilities operated in each village supported by company

Type of **activities** conducted by company to increase smallholders' health condition quality:

13
campaign

11
socialization

occurring
1-2 times a
year

SUSTAINABILITY

40%

11 out of 27

100%

of smallholders implemented **reuse, reduce, recycle** on their production process

Type of **activities** conducted by company to support smallholders implement **management waste**:

35
campaign

30
socialization

37
trainings

occurring
2-3 times a
year

GROWTH

49% dari total petani memiliki **akses kepada bantuan finansial**
5.876 dari 12.164

83% dari total **hasil panen** petani **dibeli** langsung oleh **perusahaan**
(88.768 ton hasil panen)

100% dari total petani berpartisipasi dalam **lembaga koperasi**

31% dari total petani berpartisipasi dalam **pelatihan praktik pertanian baik** yang dilakukan oleh perusahaan
(dalam 2-3 kali setahun)

17%

2.110 dari 12.164
dari total petani telah mengimplementasikan **Praktik Pertanian yang Baik**¹ dalam setiap proses produksinya

- **2104** petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam **input-sourcing**
- **1864** petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam **penanganan pascapanen**
- **1826** petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam operasi pertanian

Rata-rata pendapatan petani per bulan dari tiap komoditas:



3.000.000



6.000.000



2.500.000



3.500.000

¹ Praktik Pertanian Baik (PPB/GAP) adalah pedoman yang umum digunakan oleh petani untuk membantu upaya implementasi praktik pertanian berlanjut dan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk

HIGHLIGHTS

RESILIENCE



at least

1

health facilities operated in each village supported by company (puskesmas, posyandu, hospital)

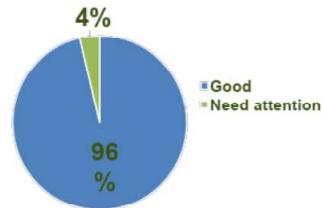
96%

3.015 out of 3.157
of smallholders implemented
act of prevention on calamity



- 2.065 smallholders used adequate equipment and tools to prevent **climate calamity** occurrence
- 1.930 smallholders implemented agricultural practice to prevent **fire calamity** occurrence
- 2.895 smallholders implemented agricultural practice to prevent **flood calamity** occurrence

Smallholders' average health condition in each village²



Type of **activities** conducted by company to increase smallholders' **health condition** quality:

13

campaign

11

socialization

occurring
1-2 times
a year

² based on annual check-up conducted

SUSTAINABILITY



100%

198 out of 198

of smallholders **implemented reuse, reduce, recycle** on their production process

Activities conducted by company to support smallholders on implementing:

Land Sustainable Management

9	9	8	occurring 1 times a year
campaign	socialization	training	

Waste Management

35	30	37	occurring 2-3 times a year
campaign	socialization	training	

89%

6.787 out of 7.688 ha of land

of total **land farm from palm oil companies** are **under implementation of land sustainable management**

Biodiversity Management

3	2	3	occurring 1 times a year
campaign	socialization	training	

GHG & Carbon Management

6	6	4	occurring 1 times a year
campaign	socialization	training	



Sesi Panel Forum Asia Tenggara 3Zero 2022 "Menuju Model yang Lebih Menarik Antara Pemangku Kepentingan dan Petani"

Pada 1 Oktober 2022, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, mewakili Sekretariat PISAgro sebagai panelis pada Forum Asia Tenggara 3Zero yang bertajuk "Menuju model yang lebih menarik antara pemangku kepentingan dan petani" yang diselenggarakan oleh Convergences dan ACTED, yang diselenggarakan di 3Zero House Manila, Kota Mandaluyong, Filipina.

Pada kesempatan ini, Direktur Eksekutif PISAgro bersama perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan dari Indonesia dan Filipina, memberikan pandangan mereka tentang kemitraan inklusif antara pemangku kepentingan dan petani, serta pengalaman PISAgro dalam mendukung inklusivitas di Indonesia melalui model *Inclusive Closed-loop*.



Acara KADIN "Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas"

Pada tanggal 3 Oktober 2022, Sekretariat PISAgro berkesempatan menghadiri "Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas" yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) di SMESCO Tower, Jakarta.



Pada kesempatan ini, Sekretariat PISAgro dan anggotanya dari kelompok kerja kakao, kopi, susu, dan kentang (MARS, Indofood, Nestle, dan Louis Dreyfus Company), memamerkan praktik terbaik penerapan model Loop Tertutup Inklusif kepada Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, bersama perusahaan peserta lainnya seperti Sinar Mas, CROWDE, Triputra Group, dll. Selain itu, Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga mencanangkan Gerakan *Inclusive Closed-loop* sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi di Indonesia.



Webinar “Waspada Cuaca Ekstrem 2023: Apa Dampaknya pada Sektor Pertanian?”

Pada tanggal 6 Oktober 2022, Sekretariat PISAgro mengadakan webinar dengan topik “Waspada Cuaca Ekstrim 2023: Apa Dampaknya pada Sektor Pertanian?” yang diselenggarakan secara online. Webinar ini dimoderatori oleh Sandra Pratiwi dari PISAgro, dengan narasumber Dr. Urip Haryoko, M.Si. dari BMKG RI, Prof Dr Rizaldi Boer dari CCROM-SEAP, Dr Takeshi Takami dari SURECO Jepang, dan Mr Samsul Huda dari Western Sydney University, Australia.

Pada kesempatan kali ini webinar ini membahas tentang prakiraan cuaca ekstrim dan dampaknya terhadap sektor pertanian. Selain itu juga dibuka sesi tanya jawab bagi peserta yang mengikuti webinar dimana peserta diberikan kesempatan untuk bertanya seputar topik yang diberikan dalam webinar ini.

Sesi Panel Investor Daily Summit 2022 “Masa Depan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan di Indonesia”

Pada 12 Oktober 2022, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, mewakili Sekretariat PISAgro sebagai panelis sesi panel Investor Daily Summit 2022, “Masa Depan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Investor Daily dan BeritaSatu Media Holdings, di Jakarta Convention Centre.

Pada kesempatan ini, Direktur Eksekutif PISAgro, bersama Tommy Wattimena dari Great Giant Foods dan Agus Purnomo dari Sinar Mas Agribusiness and Food, berbagi wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan di Indonesia, serta praktiknya untuk memberdayakan petani kecil.



GrowAsia Forum 2022

Pada tanggal 18 Oktober 2022, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, mewakili Sekretariat PISAgro untuk menghadiri Grow Asia Forum 2022 yang diselenggarakan oleh Grow Asia di Shangri-La Singapore, bersama dengan mitra, pengurus, dan anggota lainnya.

Pada kesempatan ini, forum ini menghadirkan para pemimpin pemikiran dan praktisi terkemuka dari sektor swasta, lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi nirlaba, untuk bertukar dan memamerkan model bisnis dan investasi yang dapat membantu petani, produsen, dan berbagai pelaku di seluruh rantai nilai. sektor pertanian di Asia untuk mengatasi masalah produktivitas, keberlanjutan dan perubahan iklim.



Diskusi Kelompok Terpusat Peta Jalan Kelapa Sawit dan Kakao Berkelanjutan oleh Departemen Program Internasional IPB University

Pada tanggal 24 Oktober 2022, Strategic Engagement Manager kami, Sandra Pratiwi, mewakili Sekretariat PISAgro untuk memoderasi Diskusi Kelompok Fokus Roadmap Kelapa Sawit dan Kakao Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh Direktur Program Internasional, IPB University, di IICC Botani Mall, Kampus Baranangsiang , Bogor, Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan tingkat tinggi di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, PISAgro berkesempatan untuk mengkuras wawasan dari berbagai pemangku kepentingan di forum ini, serta menampilkan keunggulan kami dalam praktik terbaik kelompok kerja dalam mendukung keberlanjutan di sektor kakao dan kelapa sawit.

Agri-food Tech Expo Asia 2022



Pada tanggal 26-28 Oktober 2022, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, memimpin delegasi dari Sekretariat PISAgro (Mushome/Meatless Kingdom, Indonesia Sustainable District Association, CROWDE, Koltiva, dan eKomediti) untuk menghadiri Agri-food Tech Expo Asia 2022, diselenggarakan bersama oleh Constellar, Singapore International Agrifood Week, dan DLG, yang diadakan di Sands Expo and Convention Centre, Singapura.

Pada kesempatan ini, kami mendapat kehormatan untuk mengadakan sesi panel “Exclusive Country Outlook of Indonesia: Cultivating agri-food security and sustainability with innovation Agri-food tech” yang dimoderatori oleh Gita Syahrani, Ketua Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dengan pembicara-pembicara yakni Yohanes Sugihtononugroho, CEO CROWDE, Widya Putra, CEO Mushome, Ainu Rofiq, COO Koltiva, dan juga Ferron Haryanto, CEO eKomediti.

Pada kesempatan ini, delegasi PISAgro berbagi wawasan mereka tentang keberlanjutan di sektor Agrifood, dan bagaimana memastikan proses rantai pasokan global dapat dilacak, inklusif, dan cerdas iklim melalui teknologi yang bertumpu pada manusia dan layanan 'boot on the ground'.

HIGHLIGHTS



PISAgro



Panel Session of the 3Zero Southeast Asia Forum 2022 "Towards a More Engaging Model Between Stakeholders and Farmers"

On the 1st of October 2022, the Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, represented the PISAgro Secretariat as a panellist on the 3Zero Southeast Asia Forum that titled " Towards a more engaging model between stakeholders and farmers" organised by Convergences and ACTED, which hosted in 3Zero House Manila, Mandaluyong City, Philippines.

On this occasion, the Executive Director of PISAgro alongside with other representatives from multiple stakeholders from Indonesia and the Philippines, gave their views on inclusive partnership between stakeholders and farmers, as well as PISAgro's experience in supporting inclusivity in Indonesia through Inclusive Closed-loop model.



KADIN Flagship Event "The Inclusive Partnership Movement for Advancing MSMEs"

On the 3rd of October 2022, PISAgro Secretariat had the opportunity to attend "The Inclusive Partnership Movement for Advancing MSMEs", organised by the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia) at the SMESCO Tower, Jakarta.



On this occasion, PISAgro Secretariat and its members from cocoa, coffee, dairy, and potato working group (MARS, Indofood, Nestle, and Louis Dreyfus Company), showcased their best practices of the implementation of Inclusive Closed-loop model to the President of Indonesia, Mr. Joko Widodo, alongside other participating companies such as Sinar Mas, CROWDE, Triputra Group, etc. Besides that, President of Indonesia, Mr. Joko Widodo, also launched The Inclusive Closed-loop Movement as the national movement for boosting economic empowerment in Indonesia.

STRENGTHENING HIGH-LEVEL INSTITUTIONS



Webinar “Extreme Weather Alert 2023: What Are Impacts on the Agriculture Sector?”

On the 6th of October 2022, the PISAgro Secretariat, held a webinar on the topic “Extreme Weather Alert 2023: What Are Impacts on the Agriculture Sector?” which held online. This webinar moderated by Sandra Pratiwi from PISAgro, with its speakers, Dr. Urip Haryoko, M.Si. from BMKG RI, Prof Dr. Rizaldi Boer from CCROM-SEAP, Dr. Takeshi Takami from SURECO Japan, and Mr. Samsul Huda from the Western Sydney University, Australia.

On this occasion, this webinar discussed extreme weather forecasts and its impacts on agricultural sector. Besides that, a question and answer session was also opened for participants who attended the webinar where participants were given the opportunity to ask questions about the topics provided in this webinar.



Investor Daily Summit 2022 Panel Session “Future of Agriculture: Sustainable Farming in Indonesia”

On the 12th of October 2022, the Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, represented the PISAgro Secretariat as the panellist of the Investor Daily Summit 2022 panel session, “Future of Agriculture: Sustainable Farming in Indonesia” which organised by Investor Daily and BeritaSatu Media Holdings, at Jakarta Convention Centre.

On this occasion, the Executive Director of PISAgro, alongside with Tommy Wattimena from Great Giant Foods and Agus Purnomo from Sinar Mas Agribusiness and Food, shared their insights and experiences in developing sustainable farming in Indonesia, as well as its practices to empower smallholders.



GrowAsia Forum 2022

On the 18th of October 2022, the Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, represented the PISAgro Secretariat to attend Grow Asia Forum 2022 which held by Grow Asia at Shangri-La Singapore, alongside other partners, boards, and members.

On this occasion, this forum brought thought leaders and leading practitioners from the private sector, financial institutions, governments and not-for-profit organisations, to exchange and showcase business and investment models that can help farmers, producers and different actors across the value chains of the agricultural sector in Asia to address productivity, sustainability and climate change-related issues.

SHIGHLIGHTS



Sustainable Palm Oil and Cocoa Roadmap Focus Group Discussion by Department of International Programme IPB University

On the 24th of October 2022, our Strategic Engagement Manager, Sandra Pratiwi, represented the PISAgro Secretariat to moderate the Sustainable Palm Oil and Cocoa Roadmap Focus Group Discussion, organised by the Director of International Programme, IPB University, at IICC Botani Mall, Baranangsiang Campus, Bogor, Indonesia.

This event was attended by representatives of various high-level stakeholders across Indonesia. On this occasion, PISAgro had the opportunity to curate insights from various stakeholders on this forum, as well as showcasing our excellences in working groups' best practices in supporting sustainability in cocoa and palm oil sector.

Agri-food Tech Expo Asia 2022

On the 26th to 28th of October 2022, the Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, led the delegations from the PISAgro Secretariat (Mushome/Meatless Kingdom, Indonesia Sustainable District Association, CROWDE, Koltiva, and eKomoditi) to attend the Agri-food Tech Expo Asia 2022, co-convened by Constellar, Singapore International Agrifood Week, and DLG, which held in the Sands Expo and Convention Centre, Singapore.

On this opportunity, we were honoured to conduct the panel session "Exclusive Country Outlook of Indonesia: Cultivating agri-food security and sustainability with innovative Agri-food tech" which moderated by Gita Syahrani, Head of Secretariat of Indonesia Sustainable District Association (LTKL), with its speakers, Yohanes Sugijtononugroho, CEO of CROWDE, Widya Putra, CEO of Mushome, Ainu Rofiq, COO of Koltiva, and also Ferron Haryanto, CEO of eKomoditi.

On this occasion, the delegations of PISAgro shared their insights about sustainability in the Agrifood sector, and how to ensure the global supply chain process is traceable, inclusive, and climate-smart through our human-centred technology and 'boots on the ground' services.

MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG COY17 DAN COP27 SERTA ISTILAH YANG TERKAIT

(Disusun oleh Hendri Surya Widaksana)



Beberapa hari lagi, COP27 sekarang benar-benar mendominasi berita utama. Dari janji untuk melakukan yang lebih baik hingga masalah besar yang kemungkinan akan dibahas dalam negosiasi penting, kami mulai mendapatkan gambaran seperti apa pertemuan puncak itu.

Konferensi internasional ini identik dengan perubahan iklim - tetapi apa sebenarnya COP27 itu, dan dapatkah itu membantu memecahkan masalah lingkungan paling mendesak di dunia?

Apa itu COP27?

Konferensi Perubahan Iklim PBB (nama resmi Konferensi Para Pihak iklim) telah diadakan setiap tahun sejak 1995. KTT dua minggu ini merupakan ruang penting bagi para pemimpin dunia, politisi, pakar, dan banyak orang lainnya untuk membahas iklim krisis di tingkat global.

Konferensi tahunan menyatukan para peserta yang menandatangi Konvensi Kerangka Kerja PBB

tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) - sebuah perjanjian lingkungan internasional yang menangani perubahan iklim - 30 tahun yang lalu.

Setiap negara anggota PBB adalah penandatangan UNFCCC, serta Palestina, Kepulauan Cook, dan Niue. Takhta Suci juga merupakan pengamat dari perjanjian tersebut. Secara efektif setiap bangsa, negara, atau negara bagian di dunia terlibat, memberikan total 197 pihak penandatangan.

Setiap tahun perwakilan dari setiap pihak berkumpul untuk membahas aksi perubahan iklim untuk Konferensi Para Pihak atau COP. Menyusul COP26 di Glasgow tahun lalu, COP ke-27 akan diselenggarakan di Mesir bulan depan.

Apa itu COY17?

Konferensi Pemuda Perubahan Iklim PBB (COY) adalah acara tahunan di bawah bendera YOUNGO – Konstituensi Pemuda Resmi UNFCCC.

COY, acara pemuda terbesar dan terlama hingga saat ini, berlangsung tepat sebelum, dan di sela-sela, Konferensi Perubahan Iklim PBB tahunan, juga dikenal sebagai Konferensi Para Pihak (COP). Dimana COY berfungsi sebagai ruang untuk pengembangan kapasitas dan pelatihan kebijakan, untuk mempersiapkan kaum muda untuk partisipasi mereka di COP, memberdayakan mereka, dan secara formal membawa suara mereka ke proses UNFCCC untuk membentuk kebijakan perubahan iklim antar pemerintah.

Apa yang bisa kita harapkan di COP27?

“Pekerjaan ke depan sangat besar. Sama besarnya dengan dampak iklim yang kita lihat di seluruh dunia,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pertemuan pra-COP baru-baru ini. “Sepertiga dari Pakistan banjir. Musim panas terpanas di Eropa dalam 500 tahun. Filipina dipukul. Seluruh Kuba padam,” tulisnya.

Menambahkan bahwa di AS, Badai Ian telah menyampaikan “peringatan brutal bahwa tidak ada negara dan ekonomi yang kebal dari krisis iklim.”

Gencarnya bencana iklim pada tahun 2022 hanya menyisakan sedikit ruang bernapas bagi masyarakat internasional untuk merespons. Dan, seperti yang ditunjukkan oleh laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB, waktu terus berjalan semakin berbahaya menuju ambang batas 1,5°C dari pemanasan global.

“COP27 sangat penting – tetapi jalan kita masih panjang,” tambah Guterres.

Kapan COY17 dan COP27 berlangsung?

COY17 berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 November, sedangkan COP27 berlangsung selama dua minggu, dari tanggal 6 hingga 18 November. Dua minggu negosiasi akan dimulai dengan KTT Pemimpin Dunia pada 7 dan 8 November. Setelah ini, pejabat pemerintah akan menangani beberapa masalah paling berat seputar iklim termasuk keuangan, dekarbonisasi, adaptasi, dan pertanian.

Di minggu kedua, topik besar termasuk gender, air dan keanekaragaman hayati akan menjadi sorotan. Iktisar kalender diterbitkan oleh PBB pada bulan Agustus di sini, dengan informasi lebih lanjut tentang hari-hari tematik tersedia di situs Kepresidenan COP27.

Meskipun tidak ada rencana untuk hari terakhir, COP terkenal karena terlalu banyak berjalan. COP26 di Glasgow tidak memberikan kesepakatan akhir hingga 13 November.

Dimana COY17 dan COP27 diadakan?

Mesir menjadi tuan rumah COY dan COP tahun ini, di kota resor Laut Merah Sharm El-Sheikh. Ini adalah COP pertama di Afrika sejak COP22 diadakan di Maroko pada 2016. Diharapkan COP ini akan menjadi fokus dan lokasi 'COP Afrika' karena negara-negara Afrika menghadapi beberapa dampak terburuk dari perubahan iklim.

Ada dua lokasi utama untuk acara ini: Zona Biru dan Zona Hijau. Yang pertama adalah tempat negosiasi resmi berlangsung, mempertemukan para delegasi dan pengamat melalui diskusi, pameran, dan kegiatan budaya.

Ruang yang dikelola PBB ini berbasis di Pusat Konvensi Internasional Sharm El-Sheikh (SHICC), tepat di sebelah selatan pusat kota.

Apa itu Perjanjian Paris?

Menurut Matthew Hoffmann, Profesor Ilmu Politik dan Direktur Bersama Lab Tata Kelola Lingkungan di Universitas Toronto di Kanada, isi utama Perjanjian Paris adalah tujuan bersama pemerintah untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C pada tahun 2030. Sejauh ini, para ahli percaya bahwa Bumi telah menghangat 1,1°C sejak tahun 1850-an.

Kesepakatan COP21 juga memaksa anggota untuk mengembangkan strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di negara mereka masing-masing.

Perjanjian Paris juga mencakup standar untuk memastikan bahwa pelaporan pengendalian emisi negara-negara konsisten. Kesepakatan ini juga dicapai untuk memastikan bahwa pengendalian emisi negara-negara sejalan dengan tujuan pemanasan 1,5°C.

Apa sebenarnya mitigasi itu?

Mitigasi (perubahan iklim) adalah aktivitas manusia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ke atmosfer, menurut Wändi Bruine de Bruin, Profesor Kebijakan Publik, Psikologi, dan Ilmu Perilaku di USC Sol Price School of Public Policy di Amerika Serikat.

Mitigasi juga dapat dilakukan melalui peningkatan penyerapan emisi karbon oleh bumi, misalnya dengan menanam pohon atau memulihkan mangrove.

Hal ini menunjukkan, menurut Wändi, bahwa mitigasi berusaha menjaga agar perubahan iklim tidak semakin parah. Karena panas tidak bisa lepas dari permukaan bumi akibat emisi yang 'menempel' di atmosfer, dunia menjadi lebih panas.

Kita dapat menurunkan emisi dengan mengurangi penggunaan batu bara dan minyak dan menggantinya dengan sumber energi terbarukan seperti sinar matahari dan angin. Namun, hal itu dapat dicapai secara tidak langsung dengan membangun struktur yang hemat energi dan hemat bahan.

Apa sebenarnya adaptasi itu?

Wändi mendefinisikan adaptasi sebagai proses manusia untuk menyesuaikan diri dengan efek perubahan iklim. Misalnya, menanam pohon tambahan di sekitar rumah untuk menjaga suhu sedikit lebih rendah dalam menghadapi perubahan iklim.

Pemerintah juga merencanakan pembangunan tembok besar di sekitar Teluk Jakarta, yang telah diperdebatkan secara luas sejak Joko Widodo menjadi Gubernur DKI, sebagai mekanisme adaptasi untuk menghindari kenaikan permukaan laut.

Adaptasi diperlukan agar orang dapat lebih memahami bagaimana hidup "berdampingan" dengan bencana. Bencana besar yang disebabkan oleh perubahan iklim kini terjadi di banyak tempat di dunia.

Apa sebenarnya NDC itu?

NDC adalah singkatan dari *Nationally Determined Contribution*, juga dikenal sebagai *National Contribution Commitment*. Menurut Dosen Fisika Geografi Richard Hodgkins, NDC merupakan "tugas

bersama" masing-masing negara untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C pada tahun 2030. Pembentukan NDC telah disepakati dalam Perjanjian Paris pada tahun 2015.

Setiap lima tahun, dokumen ini direvisi. Perjanjian Paris juga mencakup sistem untuk menilai kemajuan NDC yang dikenal sebagai "pengambilan stok global." Namun, prosedur ini tidak akan dimulai sampai tahun 2023 (dua tahun sebelum pembaruan NDC pada tahun 2025) dan tahun 2028. (sebelum pembaruan NDC pada tahun 2030).

Indonesia juga mengajukan draf NDC terbaru pada September 2022. Dalam dokumen ini, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 31,8 persen dengan skenario tanpa syarat dan 43,2 persen dengan bantuan luar negeri (bersyarat) pada tahun 2030. Jumlah ini lebih besar dari target dalam rencana NDC baru diterbitkan pada tahun 2021, yaitu 29 persen untuk kondisional dan 41 persen untuk kondisional.

Sumber: The Conversation, Euronews, COY17.eg



GET TO KNOW MORE ABOUT COY17 & COP27, AND FAMILIAR TERMS RELATED TO IT

(Written by Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



Days away, COP27 is now well and truly dominating the headlines. From promises to do better to big issues likely to be discussed at vital negotiations, we're beginning to get a picture of what the summit could look like.

This international conference is synonymous with climate change - but what is COP27 exactly, and can it help solve the world's most urgent environmental problems?

What is COP27?

The UN Climate Change Conference (the official name for climate Conferences of the Parties) has happened every year since 1995. These two-week summits are an important space for world leaders, politicians, experts and a whole host of other people to discuss the climate crisis on a global level.

The annual conferences bring together those that signed the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - an international environmental treaty addressing climate change -

30 years ago.

Every UN member state is a signatory for the UNFCCC, as well as Palestine, the Cook Islands and Niue. The Holy See is also an observer of the treaty. Effectively every nation, country, or state in the world is involved, giving a total of 197 signatory parties.

Each year representatives from every party come together to discuss action on climate change for the Conference of the Parties or COP. Following COP26 in Glasgow last year, the 27th COP is being hosted in Egypt next month.

What is COY17?

The UN Climate Change Conference of Youth (COY) is an annual event under the banner of YOUNGO – The Official Youth Constituency of the UNFCCC.

COY, the largest and longest running youth event to date, takes place right before, and on the sideline of,

the annual UN Climate Change Conference, also known as Conference of the Parties (COP). Where COY serves as a space for capacity building and policy training, in order to prepare young people for their participation at COP, empower them, and formally bring their voices to the UNFCCC processes to shape the intergovernmental climate change policies.

What can we expect at COP27?

"The work ahead is immense. As immense as the climate impacts we are seeing around the world," UN Secretary-General Antonio Guterres said during a recent pre-COP meeting.

"A third of Pakistan flooded. Europe's hottest summer in 500 years. The Philippines hammered. The whole of Cuba in black-out," he listed.

Adding that in the US, Hurricane Ian has delivered "a brutal reminder that no country and no economy is immune from the climate crisis."

The onslaught of climate disasters in 2022 has left little breathing space for the international community to respond. And, as the latest report from the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) shows, time is ticking ever more dangerously towards the 1.5C threshold of global warming.

"COP27 is critical – but we have a long way to go," adds Guterres.

When is COY17 and COP27?

COY17 is taking place from the 2nd to the 4th of November, while COP27 is taking place over two weeks, from the 6th to the 18th of November.

The fortnight of negotiations will kick off with a World Leader's Summit on 7th and 8th of November. After this, government officials will tackle some of the weightiest issues surrounding climate including finance, decarbonisation, adaptation and agriculture.

In the second week, big topics including gender, water and biodiversity will be in the spotlight.

An overview of the calendar was published by the UN in August here, with more information on the thematic days available on the COP27 Presidency site.

Though there are no plans for the final day, COPs are notorious for over-running. COP26 in Glasgow didn't deliver a final agreement until 13th of November.

Where are COY17 and COP27 being held?

Egypt is hosting both COY and COP this year, in the Red Sea resort town of Sharm El-Sheikh. This is the first COP in Africa since COP22 was held in Morocco in 2016. It's hoped that it will be an 'African COP' in focus as well as location as African countries face some of the worst impacts of climate change.

There are two main sites for the event: the Blue Zone and the Green Zone. The former is where the official negotiations take place, bringing together the delegates and observers through discussions, exhibits and cultural activities.

This UN-managed space is based at the Sharm El-Sheikh International Convention Center (SHICC), just south of the town centre.

What is the Paris Agreement?

According to Matthew Hoffmann, Professor of Political Science and Co-Director of the Environmental Governance Lab at the University of Toronto in Canada, the major content of the Paris Agreement is the common goal of governments to limit global warming to 1.5°C by 2030. So far, experts believe that the Earth has warmed by 1.1°C since the 1850s.

The COP21 accord also compels members to develop strategies to reduce greenhouse gas emissions in their particular nations.

The Paris Agreement also includes standards to ensure that countries' emission control reporting are consistent. This agreement was also reached to ensure that countries' emission controls are in line with the 1.5°C warming objective.

What exactly is mitigation?

Mitigation (climate change) is human activity to reduce greenhouse gas emissions into the atmosphere, according to Wändi Bruine de Bruin, Professor of Public Policy, Psychology, and Behavioral Science at the USC Sol Price School of Public Policy in the United States.

Mitigation can also be accomplished through boosting the Earth's absorption of carbon emissions, for as by planting trees or recovering mangroves.

This indicates, according to Wändi, that mitigation tries to keep climate change from worsening. Because heat cannot escape from the Earth's surface due to emissions that 'stick' in the atmosphere, the globe becomes hotter.

We can lower emissions by reducing the use of coal and oil and replacing them with renewable energy sources such as sunshine and wind. It may, however, be accomplished indirectly by constructing energy-efficient and material-efficient structures.

What exactly is adaptation?

Wändi defines adaptation as a human process of adjusting to the effects of climate change. For example, planting additional trees around the home to keep the temperature a little lower in the face of climate change.

The administration is also touting the construction of a massive wall surrounding Jakarta Bay, which has been extensively debated since Joko Widodo became Governor of DKI, as an adaptation mechanism to avoid sea level rise.

Adaptation is necessary so that people may better grasp how to live "side by side" with calamities. Major disasters caused by climate change are now occurring in many places of the world.

What exactly is NDC?

NDC is an abbreviation for Nationally Determined Contribution, also known as National Contribution Commitment. According to Lecturer of Physical Geography Richard Hodgkins, the NDC is each country's "collective duty" to limit global warming to 1.5°C by 2030. The establishment of NDCs was agreed upon in the Paris Agreement in 2015.

Every five years, this document is revised. The Paris Agreement also includes a system for assessing the progress of NDCs known as the "global stocktake."

However, this procedure will not begin until 2023 (two years before the NDC renewal in 2025) and 2028. (before the NDC renewal in 2030).

Indonesia likewise filed its most recent NDC draught in September 2022. In this document, the government commits to decreasing emissions by 31.8 percent under an unconditional scenario and 43.2 percent with foreign aid (conditional) by 2030. This amount is greater than the aim in the new NDC plan issued in 2021, which is 29 percent for unconditional and 41 percent for conditional.

Source: The Conversation, Euronews, COY17.eg



CERITA KELOMPOK KERJA

NESTLÉ MELUNCURKAN NESCAFÉ PLAN 2030 UNTUK MEMBANTU MENDORONG PERTANIAN REGENERATIF, MENGURANGI EMISI GAS RUMAH KACA, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

(Disusun oleh Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



NESCAFÉ, merek kopi terbesar Nestlé dan salah satu kopi terfavorit dunia, pada hari ini menyampaikan rencana besarnya untuk mendorong pelaksanaan pertanian kopi yang lebih berkelanjutan: NESCAFÉ Plan 2030. Bersama dengan para petani kopi, NESCAFÉ bertekad untuk mendorong mereka beralih ke pertanian regeneratif, serta mempercepat dekade kerja dalam lingkup NESCAFÉ Plan.

NESCAFÉ menginvestasikan lebih dari satu miliar Swiss Franc untuk melaksanakan program NESCAFÉ Plan. Investasi ini merupakan kelanjutan dari program NESCAFÉ Plan yang telah ada, dan akan diperluas untuk area cakupan keberlanjutan. Hal ini didukung oleh pembiayaan program pertanian regeneratif Nestlé, yang sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk mempercepat transisi menuju sistem pangan regeneratif, serta ambisi

untuk mencapai net zero gas rumah kaca.

David Rennie, Head of Nestlé Coffee Brands menjelaskan, "Perubahan iklim turut mempengaruhi wilayah pertanian kopi. Berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan NESCAFÉ Plan selama sepuluh tahun, kami mendorong upaya percepatan dalam mengatasi perubahan iklim maupun tantangan sosial dan ekonomi dalam mata rantai usaha NESCAFÉ.

"Peningkatan suhu akan mengakibatkan berkurangnya area yang sesuai untuk menanam kopi hingga 50% pada tahun 2050.¹ Pada saat yang sama, sekitar 125 juta orang bergantung pada komoditi kopi untuk kesejahteraan mereka² dan diperkirakan 80% keluarga petani kopi berada di tengah atau di bawah garis kemiskinan.³ Untuk itu, diperlukan upaya-upaya dalam memastikan keberlanjutan kopi jangka panjang.

“NESCAFÉ berambisi untuk dapat memberikan dampak nyata pada pertanian kopi secara global, sebagai merek kopi terkemuka di dunia,” ucap Philipp Navratil, Head of Nestlé’s Coffee Strategic Business Unit. “Kami ingin petani kopi berkembang, sebagaimana kami ingin komoditi kopi berdampak positif bagi lingkungan. Upaya-upaya kami ini diharapkan mampu membantu mendorong perubahan pada industri kopi.”

Mendukung transisi petani ke pertanian kopi regeneratif

Pertanian regeneratif adalah pendekatan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah – serta melindungi sumber daya air dan keanekaragaman hayati. Tanah yang lebih sehat tentunya lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim, dan dapat meningkatkan hasil panen, maupun membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

NESCAFÉ akan mendampingi petani melalui pelatihan, bantuan teknis, dan pengadaan bibit kopi berkualitas tinggi untuk membantu mereka beralih ke praktik pertanian kopi regeneratif. Beberapa contoh praktik pertanian regeneratif antara lain, sebagai berikut:

- Penanaman jenis tanaman penaung untuk membantu melindungi tanah. Hal ini juga dapat membantu menambahkan biomassa ke tanah, yang dapat meningkatkan bahan organik tanah untuk meningkatkan penyerapan karbon tanah.
- Pemanfaatan pupuk organik yang dapat berkontribusi pada kesuburan tanah yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tanah.
- Peningkatan pola agroforestri dan tumpang sari yang berkontribusi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati.
- Pemangkasan atau penanaman ulang dengan bibit yang tahan hama atau tahan perubahan iklim, sehingga dapat membantu peremajaan kebun kopi dan peningkatan hasil panen.

Berfokus kepada lokasi di mana NESCAFÉ mendapatkan 90% pasokan kopinya

NESCAFÉ akan bekerja sama dengan para petani kopi untuk menguji, mempelajari, dan menilai efektivitas berbagai praktik pertanian

regeneratif. Hal ini akan dilakukan dengan fokus pada tujuh sumber utama, di mana 90% kopi NESCAFÉ berasal, yaitu: Brazil, Vietnam, Meksiko, Kolombia, Pantai Gading, Indonesia, dan Honduras.

NESCAFÉ bertujuan untuk mencapai:

- Memastikan 100% pengadaan kopi secara bertanggung jawab pada tahun 2025.
- Pada 2025 sebanyak 20% kopi bersumber dari metode pertanian regeneratif, dan 50% pada tahun 2030 sebagai bagian dari ambisi Nestlé pada bahan baku utama
- Uji coba skema dukungan finansial di Meksiko, Pantai Gading, dan Indonesia untuk mempercepat transisi ke pertanian regeneratif

NESCAFÉ berkomitmen untuk mendukung petani yang bersedia menanggung risiko dan biaya yang berkaitan dengan transisi menuju pertanian regeneratif. NESCAFÉ akan menyediakan program yang bertujuan untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan sebagai hasil dari transisi tersebut. Di Meksiko, Pantai Gading dan Indonesia, NESCAFÉ akan melakukan uji coba skema dukungan keuangan untuk membantu petani mempercepat transisi ke pertanian regeneratif. Melalui skema ini, NESCAFÉ bersama para petani kopi, akan menguji dan mempelajari pendekatan terbaik di setiap negara. Hal ini mencakup langkah-langkah berikut:

- Insentif tunai bersyarat untuk mengadopsi praktik pertanian regeneratif
- Perlindungan pendapatan menggunakan asuransi cuaca
- Akses kredit yang lebih besar bagi petani

NESCAFÉ akan memantau perkembangan dan menilai hasil pelaksanaan program dengan petani kopi melalui Pemantauan dan Evaluasi yang akan dilakukan oleh Rainforest Alliance. Upaya tersebut akan dilengkapi dengan kemitraan yang fokus pada keahlian, seperti kemitraan bersama Sustainable Food Lab untuk topik yang terkait dengan penilaian pendapatan, strategi, dan pelacakan kemajuan petani kopi.

Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menangkap dan menyimpan lebih banyak karbon di dalam tanah

Pertanian regeneratif juga memiliki kontribusi terhadap penarikan karbon dioksida dari

atmosfer dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu pertanian regeneratif merupakan bagian yang penting dalam peta jalan net zero gas rumah kaca Nestlé. NESCAFÉ memiliki komitmen net zero gas rumah kaca untuk mengurangi separuh emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dan mencapai net zero gas rumah kaca pada tahun 2050. NESCAFÉ akan bekerja sama dengan petani, pemasok, & mitra untuk membantu melindungi lahan pertanian, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan membantu mencegah deforestasi. Selain itu, NESCAFÉ turut bertujuan untuk membantu para petani untuk menanam lebih dari 20 juta pohon di atau di dekat perkebunan kopi mereka.

Nestlé Indonesia turut mendukung dan mempercepat transisi ke sistem pangan regeneratif dengan mendorong praktik-praktik pertanian regeneratif pada petani kopi di Tanggamus, Lampung. Tim AgriService Nestlé Indonesia memanfaatkan pengetahuan lokal untuk mengembangkan dua model tumpang sari kopi yang memperkuat penghidupan petani kecil dan meningkatkan kualitas bentang alam kebun kopi di Sumatera. Inisiatif tumpang sari kopi merupakan salah satu model praktik pertanian regeneratif untuk mencapai target net zero gas rumah kaca.

Maju dengan membangun fondasi yang kuat

Pemberitahuan hari ini berdasar pada upaya keberlanjutan NESCAFÉ dalam memproduksi kopi. Sejak 2010, NESCAFÉ telah berinvestasi pada keberlanjutan melalui NESCAFÉ Plan dan telah membuat kemajuan yang signifikan:

Bahan baku kopi yang dipasok secara bertanggung jawab:

82%

kopi NESCAFÉ berasal dari sumber yang bertanggung jawab pada tahun 2021

Bibit tanaman kopi:

250 juta

bibit tanaman kopi telah didistribusikan kepada para petani sejak 2010

Pemantauan dan Evaluasi:

bersama Rainforest Alliance melakukan penilaian dampak dalam kemitraan di

14 negara

Emisi gas rumah kaca:

46%

pengurangan emisi gas rumah kaca di pabrik pengolahan kopi kami (2020 vs. 2010, per ton produk)

Pemanfaatan air:

53%

lebih sedikit memanfaatkan air di pabrik pengolahan kopi kami (2020 vs 2010, per ton produk)



■ WORKING GROUP STORY

NESTLÉ LAUNCHES NESCAFÉ PLAN 2030 TO HELP DRIVE REGENERATIVE AGRICULTURE, REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND IMPROVE FARMERS' LIVELIHOODS

(Written by Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



Nescafé, Nestlé's largest coffee brand and one of the world's favorite coffees, outlined today its extensive plan to help make coffee farming more sustainable: the Nescafé Plan 2030. The brand is working with coffee farmers to help them transition to regenerative agriculture while accelerating its decade of work under the Nescafé Plan.

The brand is investing over one billion Swiss francs by 2030 in the Nescafé Plan 2030. This investment builds on the existing Nescafé Plan as the brand expands its sustainability work. It is supported by Nestlé's regenerative agriculture financing following the Group's commitment to accelerate the transition to a regenerative food system and ambition to achieve zero net greenhouse gas emissions.

David Rennie, Head of Nestlé Coffee Brands said, "Climate change is putting coffee-growing

areas under pressure. Building on 10 years' experience of the Nescafé Plan, we're accelerating our work to help tackle climate change and address social and economic challenges in the Nescafé value chains."

Rising temperatures will reduce the area suitable for growing coffee by up to 50% by 2050. At the same time, around 125 million people depend on coffee for their livelihoods and an estimated 80% of coffee-farming families live at or below the poverty line. Action is needed to ensure the long-term sustainability of coffee.

"As the world's leading coffee brand, Nescafé aims to have a real impact on coffee farming globally," said Philipp Navratil, Head of Nestlé's Coffee Strategic Business Unit. "We want coffee farmers to thrive as much as we want coffee to have a positive impact on the environment. Our

actions can help drive change throughout the coffee industry."

Supporting farmers' transition to regenerative coffee farming

Regenerative agriculture is an approach to farming that aims to improve soil health and fertility - as well as protect water resources and biodiversity. Healthier soils are more resilient to the impacts of climate change and can increase yields, helping improve farmers' livelihoods.

Nescafé will provide farmers with training, technical assistance and high-yielding coffee plantlets to help them transition to regenerative coffee farming practices. Some examples of regenerative agriculture practices include the following:

- Planting cover crops helps to protect the soil. It also helps add biomass to the soil, which can increase soil organic matter and thus soil carbon sequestration.
- Incorporating organic fertilizers contributes to soil fertility, which is essential for good soil health.
- Increasing the use of agroforestry and intercropping contributes to biodiversity preservation.
- Pruning existing coffee trees or replacing them with disease and climate-change resistant varieties, will help rejuvenate coffee plots and increase yields for farmers.

Focusing on origins from where Nescafé sources 90% of its coffee

Nescafé will be working with coffee farmers to test, learn and assess the effectiveness of multiple regenerative agriculture practices. This will be done with a focus on seven key origins, from where the brand sources 90% of its coffee: Brazil, Vietnam, Mexico, Colombia, Côte d'Ivoire, Indonesia and Honduras.

Nescafé aims to achieve:

- 100% responsibly sourced coffee by 2025
- 20% of coffee sourced from the regenerative agricultural methods by 2025 and 50% by 2030 as part of Nestlé's ambition for its key ingredients
- Piloting a financial support scheme in Mexico, Côte d'Ivoire and Indonesia to accelerate the transition to regenerative agriculture

Nescafé is committed to supporting farmers who take on the risks and costs associated with the move to regenerative agriculture. It will provide programs that aim to help farmers improve their income as a result of that transition. In Mexico, Côte d'Ivoire and Indonesia, Nescafé will pilot a financial support scheme to help farmers accelerate the transition to regenerative agriculture. Through this scheme, Nescafé, together with coffee farmers, will test and learn the best approach in each country. These could include measures such as:

- The conditional cash incentives for adopting regenerative agriculture practices
- Income protection using weather insurance
- Greater access to credit lines for farmers

Nescafé will track the progress and assess the results of its field programs with coffee farmers through its Monitoring and Evaluation partnership with the Rainforest Alliance. Its efforts will be complemented by new and expertise-focused partnerships, like the one with Sustainable Food Lab for topics related to coffee farmers' income assessment, strategy and progress tracking.

Reducing greenhouse gas emissions also by capturing and storing more carbon in the soil

Regenerative agriculture also contributes to drawing down carbon dioxide from the atmosphere and reducing greenhouse gas emissions. That's why regenerative agriculture is a key part of Nestlé's Zero Net roadmap. Nescafé aims to contribute to Nestlé's Zero Net commitment to halve greenhouse gas emissions by 2030 and reach zero net greenhouse gas emissions by 2050. It will work with farmers, suppliers and partners to help protect agricultural lands, enhance biodiversity and help prevent deforestation. The brand intends to help farmers plant more than 20 million trees at or near their coffee farms.

Nestlé Indonesia also supports and accelerates the transition to a regenerative food system by encouraging regenerative farming practices for coffee farmers in Tanggamus, Lampung. The Nestlé Indonesia AgriService team utilized local knowledge to develop two coffee intercropping models that strengthen the livelihoods of small farmers and improve the quality of the

landscape of coffee plantations in Sumatra. The coffee intercropping initiative is one of the models of regenerative farming practices to achieve the net zero greenhouse gas target.

Going forward by building on a strong foundation

Today's announcement builds on Nescafé's sustainability efforts in coffee production. Since 2010, the brand has invested in sustainability through the Nescafé Plan and has made significant progress:

Responsibly sourced coffee:

82%

of Nescafé's coffee was responsibly sourced in 2021

Coffee plantlets:

250 million

new coffee plantlets distributed to farmers since 2010

Monitoring and evaluation:

impact assessment in partnership with the Rainforest Alliance across

14 countries

Greenhouse gas emissions:

46%

reduction in greenhouse gas emissions in our soluble coffee factories (2020 vs. 2010, per tonne of product)

Water usage:

53%

less water withdrawal in our soluble coffee factories (2020 vs 2010, per tonne of product)



USAHA PISAGRO BERPARTISIPASI MENINGKATKAN KELAS UMKM DENGAN PENERAPAN *INCLUSIVE CLOSED-LOOP FLYWHEEL*

(Written by Ferial Lubis, PISAgro)

Sebagai rangkaian acara “Gerakan Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas” telah dilaksanakan panel diskusi dengan Moderator: Prof. Bambang Brodjonegoro. Pada kata pembuka, moderator menyatakan bahwa panel diskusi ini pada intinya membahas bagaimana para pengusaha termasuk anggota PISAgro mengusahakan agar UMKM dapat naik kelas dan bagaimana cara terbaik agar pengusaha dapat bermitra langsung dengan Pemerintah untuk meningkatkan kelas UMKM. Moderator juga menekankan bahwa tidak cukup hanya UMKM yang banyak jumlahnya tetapi diperlukan juga UMKM yang berkualitas. UMKM harus naik kelas, hal ini ada kaitannya dengan usaha Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dimana pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 0%. Hal ini memerlukan usaha yang luar biasa, tidak hanya Pemerintah tetapi harus dibantu oleh kelompok/pengusaha.

Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Teten Masduki menyatakan bahwa keberadaan para pengusaha sangat penting dalam membangun sistem kemitraan rantai pasok dengan UMKM dan Koperasi.

Namun terdapat beberapa tantangan UMKM untuk masuk ke rantai pasok yaitu:

- Belum banyak UMKM Indonesia yang secara efektif terkait dengan jaringan produksi global. Partisipasi UMKM Indonesia dalam *Global Value Chain* (GVC) masih rendah yaitu 4,1% dari jumlah unit usaha, sedangkan Malaysia sudah mencapai 46,2%, Vietnam 20,1%, Thailand 29,6% dan Filipina 21,4%. Dari keseluruhan usaha besar 25,6% nya telah berpartisipasi dalam GVC. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi untuk lebih berpartisipasi dalam GVC;
- Rendahnya kemitraan strategis: 7% usaha mikro dan kecil yang menjalin kemitraan dengan usaha besar;

- Tingginya biaya logistik *inbound* dan *outbound* (75%). *Inbound logistics*: bahan baku produksi sebagian besar impor. Indeks Performa Logistik (LPI) Indonesia masih rendah peringkat 46. *Outbound logistics*: proses pengiriman produk tujuan ekspor;
- Rendahnya daya saing peringkat 73. Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia stagnan dan rendahnya pemenuhan sertifikasi internasional.

Meskipun Indonesia telah masuk dalam GVC, namun masih berada pada posisi yang relatif rendah dibandingkan dengan negara *peers*. Indonesia berada di posisi ke 20 dari 31 negara di Asia dalam partisipasi GVC Perusahaan. Sedangkan untuk ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke-7 dari 9 di partisipasi GVC.

Lebih lanjut, Menteri Koperasi menekankan bahwa saat ini UMKM belum terintegrasi dengan swasta usaha besar, integrasi yang diinginkan saat ini adalah integrasi untuk suplai komponen bukan dalam bentuk konsep bapak asuh lagi. Diharapkan UMKM dapat menjadi bagian dari usaha besar, menjadi bagian dari inti bisnis usaha besar.

Kementerian Koperasi dan UMKM mengusulkan beberapa poin untuk meningkatkan kemitraan antara pengusaha besar dengan UMKM, yaitu:

- Diharapkan agar para pengusaha besar aktif membangun ekosistem kemitraan rantai pasok dengan UMKM dan Koperasi;
- Pengusaha agar lebih aktif melakukan business matching dengan UMKM;
- Membantu merumuskan kebijakan ekosistem rantai pasok setiap sektor usaha;
- Ikut membantu identifikasi kemitraan rantai pasok UMKM dan Koperasi dengan BUMN;
- Mengembangkan *market intelligence* untuk pasar ekspor di berbagai negara;
- Mendorong anggotanya menjadi aggregator untuk pasar luar negeri.

Bapak Arif P.Rahmat, WKU Pertanian KADIN Indonesia dan Board Member PISAgro pada panel diskusi tersebut menyatakan bahwa selama ini anggota PISAgro telah menerapkan best practise dengan menjalankan *Inclusive Closed-Loop Flywheel* yaitu pendampingan *end-to-end* atau pendampingan yang melekat. *Inclusive Closed-Loop Flywheel* merupakan bentuk sebuah lingkaran/roda dimana didalamnya ada UMKM (petani, nelayan, warung kecil) dikelilingi oleh multi-stakeholders yang berkolaborasi atau bergotong-royong antara dunia usaha, Pemerintah, institusi perbankan, *civil society*, NGO, akademisi dstnya. Agar roda dapat berputar maka harus ada yang menginisiasi, Pengusaha/swasta bersama Pemerintah berinisiatif menjadi katalis agar roda ini berputar.

Di PISAgro sekarang ada 10 komoditi dengan sekitar 2 juta petani yang sudah menerapkan *Inclusive Closed-Loop Flywheel* dan sudah terbukti dapat meningkatkan produksi double dalam waktu yang relatif singkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor.

Contohnya petani hortikultura di Garut yang bekerjasama dengan IPB, Mercy Corps, Bupati Garut dan Indofood. Demikian juga dengan petani jagung di NTT yang berkolaborasi dengan PT Seger, Bayer (menyediakan bibit unggul), Mercy Corps (NGO), Prisma (yang melakukan survey apa yang dibutuhkan petani di lapangan) dan BRI yang menyediakan KUR. Jadi semua pelaku kepentingan berperan. Kunci keberhasilan adalah Gotong Royong dan harus ada yang berinisiasi dari dunia usaha sehingga pendampingan sangat melekat.

Penerapan *Inclusive Closed-Loop Flywheel* juga memberikan perhatian kepada 3 faktor yaitu *Environment – Social – Governance* yang saling mendukung dan tidak dapat dipilih mana yang lebih penting. PT Sinar Mas adalah salah satu contoh yang menerapkan konsep ESG melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), tanpa deforestasi ternyata kesejahteraan petani dapat meningkat.

Program Peremajaan Sawit Rakyat atau program peremajaan komoditas lainnya dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan

petani meningkat, kemiskinan menurun, dan lingkungan hidup juga bisa dijaga. Keberhasilan ini diusahakan bukan hanya pada sektor pertanian tetapi juga lintas sektor misalnya dengan sektor perikanan.

Diharapkan Gerakan *Inclusive Closed-Loop Flywheel* menjadi Gerakan Nasional dimana perusahaan yang menyisihkan 1-2% dari keuntungan perusahaan secara sukarela bisa mendapat potongan pajak hingga 200%. Pengusaha dapat bekerjasama dengan media nasional yang dapat mengeluarkan indeks (hijau, kuning dan merah misalnya). Perusahaan yang memperoleh indeks warna hijau artinya bernilai bagus dan dapat dipamerkan dan dapat merasa bangga. Sedangkan perusahaan yang masih berwarna kuning atau merah dapat didorong untuk dapat naik kelas. Jadi yg naik kelas bukan hanya UMKM tetapi juga dunia usahanya. Dunia usaha juga perlu dinilai agar dapat naik kelas karena memberikan kontribusi bagi lingkungannya, baik sosial maupun ekonomi.

Diharapkan juga Gerakan ini bukan hanya Gerakan nasional tetapi dengan Presidensi G20 ingin membuat Gerakan ini menjadi Gerakan internasional. Hal ini telah mendapat respon yang baik dari beberapa MNCs. Pada bulan November 2022 akan di tampilkan semua perusahaan-perusahaan yang sudah menandatangani Gerakan *Inclusive Closed-Loop Flywheel*.

PISAGRO'S EFFORTS TO PARTICIPATE IN MSMEs IMPROVEMENT THROUGH THE INCLUSIVE CLOSED-LOOP FLYWHEEL IMPLEMENTATION

(Written by Ferial Lubis, PISAgro)

As a series of events, "Inclusive Partnership Movement for MSMEs Improvement", a panel discussion with Moderator: Prof. Bambang Brodjonegoro. In the opening remarks, the moderator stated that this discussion panel essentially discussed how entrepreneurs, including PISAgro members, tried to get MSMEs to advance to class and what was the best way for entrepreneurs to partner directly with the Government to improve the MSME class. The moderator also emphasised that it is not enough just to have a large number of MSMEs, but also MSMEs with quality. MSMEs must advance to class, this has something to do with the Government's efforts to reduce extreme poverty which in 2024 is targeted to reach 0%. This requires extraordinary efforts, not only the Government but must be assisted by groups/entrepreneurs.

The Minister of Cooperatives and MSMEs, Mr. Teten Masduki stated that the existence of entrepreneurs is very important in building a supply chain partnership system with MSMEs and Cooperatives.

However, there are several challenges for SMEs to enter the supply chain, namely:

- a. Not many Indonesian MSMEs are effectively linked to global production networks. The participation of Indonesian MSMEs in the Global Value Chain (GVC) is still low at 4.1% of the total business units, while Malaysia has reached 46.2%, Vietnam 20.1%, Thailand 29.6% and the Philippines 21.4%. Of all large businesses, 25.6% have participated in GVC. This shows that Indonesian MSMEs have the potential to participate more in GVC;
- b. Low strategic partnerships: 7% of micro and small businesses that form partnerships with large businesses;
- c. The high cost of inbound and outbound logistics (75%). Inbound logistics: most of the

raw materials for production are imported. Indonesia's Logistics Performance Index (LPI) is still low at 46. Outbound logistics: the process of sending products to export destinations; d. Low competitiveness, ranking 73. Indonesia's Ease of Doing Business ranking is stagnant and the fulfillment of international certification is still low.

Even though Indonesia has been included in the GVC, it is still in a relatively low position compared to peer countries. Indonesia is in the 20th position out of 31 countries in Asia in the Company's GVC participation. As for ASEAN, Indonesia ranks 7th out of 9 in the GVC participation.

Furthermore, the Minister of Cooperatives emphasised that currently MSMEs have not been integrated with large private businesses, the desired integration at this time is integration for component supply, not in the form of a foster father concept anymore. It is hoped that MSMEs can become part of big businesses, become part of the core business of big businesses.

The Ministry of Cooperatives and MSMEs proposes several points to increase partnerships between large entrepreneurs and small, medium and cooperatives, namely:

- a. It is hoped that large entrepreneurs will actively build a supply chain partnership ecosystem with MSMEs and Cooperatives;
- b. Entrepreneurs to be more active in doing business matching with MSMEs;
- c. Help formulate supply chain ecosystem policies for each business sector;
- d. Participate in identifying the supply chain partnerships of SMEs and Cooperatives with SOEs;
- e. Develop market intelligence for export markets in various countries;

f. Encouraging its members to become aggregators for foreign markets.

Mr. Arif P. Rahmat, Vice President of Agriculture of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, and Board Member of PISAgro on the discussion panel stated that so far PISAgro members have implemented best practice by running the Inclusive Closed-loop Flywheel, namely end-to-end assistance or attached assistance. Inclusive Closed-loop Flywheel is the form of a circle/wheel in which there are MSMEs (farmers, fishermen, small stalls) surrounded by multi-stakeholders who collaborate or work together between the business world, government, banking institutions, civil society, NGOs, academics and so on. In order for the wheel to turn, there must be an initiator. Entrepreneurs/private companies together with the Government take the initiative to become a catalyst for this wheel to spin.

At PISAgro there are now 10 commodities with around 2 million farmers who have implemented the Inclusive Closed-loop Flywheel and have been proven to be able to increase double production in a relatively short time so that they can meet domestic and even export needs.

For example, horticultural farmers in Garut in collaboration with IPB, Mercy Corps, Garut Regent and Indofood. Likewise, corn farmers in NTT collaborate with PT Seger, Bayer (providing superior seeds), Mercy Coop (NGO), Prisma (which surveys what farmers need in the field) and BRI which provides KUR. So all stakeholders play a role. The key to success is Gotong Royong and there must be an initiative from the business world so that assistance is very attached.

The implementation of the Inclusive Closed-loop Flywheel also pays attention to 3 factors, namely Environment - Social - Governance which support each other and cannot be chosen which is more important. PT Sinar Mas is one example of applying the ESG concept through the Desa Makmur Peduli Api (DMPA) program, without deforestation it turns out that farmers' welfare can be increased.

The People's Palm Oil Replanting Programme or other commodity rejuvenation programmes can increase productivity, increase farmers' welfare, decrease poverty, and protect the environment. This success is sought not only in the agricultural sector but also across sectors, for example with the fisheries sector.

It is hoped that the Inclusive Closed-loop Flywheel Movement will become a National Movement where companies voluntarily set aside 1-2% of the company's profits to get a tax cut of maybe up to 200%. Entrepreneurs can cooperate with national media which can issue indexes (green, yellow and red for example). Companies that get the green color index means that they have good value and can be shown in a show case and can feel proud. Meanwhile, companies that are still yellow or red can be encouraged to be promoted. So it's not only MSMEs who go up to class, but also the business world. The business world also needs to be assessed in order to be able to advance to class because it contributes to the environment both socially and economically.

It is also hoped that this Movement will not only be a national Movement but with the G20 Presidency to make this Movement an international Movement. This has received a good response from several MNCs. In November 2022, all the companies that have signed the Inclusive Closed-loop Flywheel Movement will be featured.

Standarisasi Industri Pertanian untuk Menunjang Kualitas Produk Pertanian dan Ketahanan Pangan

Wawancara PISAgro - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Pada kesempatan kali ini, PISAgro berbicara dengan Bapak Prof. (Riset) Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. untuk mengenal lebih jauh tentang pembentukan Badan Standardisasi Alat Pertanian (Badaristan), dan upaya yang dilakukan untuk menunjang ketahanan pangan dan juga kualitas produk pertanian di Indonesia.

1. Dalam Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Pasal 29 disebutkan adanya Badan yang baru dibentuk yaitu Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Badaristan). Badaristan mempunyai tugas “menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian”. Output yang dihasilkan Badaristan yaitu tersedianya standar instrumen pertanian.

Apakah yang dimaksud dengan standar instrumen pertanian? Apakah tugas ini hanya sampai pada tersedianya standar instrumen pertanian atau lebih dari itu sampai kepada penerapannya di lapangan?

Pertanian berkelanjutan yang maju, mandiri, modern tidak terlepas dari standar instrumen pertanian berupa sumber daya pertanian pendukung mulai dari tata Kelola lahan dan air, alat dan mesin pertanian (alsintan), tanaman, ternak, serta pangan yang siap dikonsumsi, berkualitas dan memenuhi syarat keamanan pangan. Mengacu ke UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian berkelanjutan, ruang lingkup instrumen pertanian dimulai dari hulu sampai hilir meliputi benih/bibit, pupuk, pestisida, lahan/tanah, air, alat dan mesin pertanian, pascapanen pertanian, mutu produk hasil budi daya pertanian, dan kelembagaan.

Standarisasi dalam UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, mengawasi, dan harmonisasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. Sedangkan tugas Badaristan/BSIP seperti termaktub di Perpres Nomor 117 tahun 2022 adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, & pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.



Dari definisi di atas, Standarisasi instrumen pertanian merupakan rangkaian proses yang komprehensif untuk menyediakan standar untuk instrumen pertanian yang kemudian diatur dengan kewenangan BSN (Badan Standardisasi Nasional) menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses ini bertujuan untuk memberikan dukungan peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel sektor pertanian. Pada akhirnya, penerapan standar instrumen pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Tugas Badaristan secara operasional akan berkoordinasi untuk proses standarisasi dengan semua pihak. Selain SNI, Badaristan juga akan merumuskan konsep Persyaratan Teknis Minimal (PTM) untuk mendukung kebijakan Kementerian Pertanian. Tidak berhenti di penyediaan, Badaristan bersama dengan BSN akan menyebarluaskan standar dan mendorong penerapan standar di masyarakat. Standar instrumen pertanian tentu saja perlu dikelola dengan baik agar dapat diacu dan diterapkan sepenuhnya, dilakukan penilaian kesesuaiannya di masing-masing organisasi, dikelola umpan balik penerapan standar tersebut di lapang dan tidak tumpang tindih



2. Dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 disebutkan fungsi Badaristan antara lain: “menyusun kebijakan teknis perencanaan dan program, pelaksanaan koordinasi dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi terhadap perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian”.

Berdasarkan fungsi tersebut apakah Badaristan melakukan pembinaan langsung terhadap petani atau perusahaan agar produk yang dihasilkan dapat terjamin mutu dan keamanan pangan segera sehingga dapat diedarkan di dalam negeri maupun dapat dieksport ke luar negeri?

Mengacu pada salah satu fungsi Badaristan: “menyusun kebijakan teknis perencanaan dan program, pelaksanaan koordinasi dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi terhadap perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian” menunjukkan bahwa Badaristan akan menyusun suatu rekomendasi kebijakan berdasarkan perencanaan program standardisasi, kemudian akan mengevaluasi pelaksanaan program standardisasi tersebut, sehingga kegiatan selalu termonitor dalam pencapaian targetnya serta menerbitkan suatu rekomendasi kebijakan standar instrumen pertanian yang dibutuhkan untuk mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern. Pembinaan kepada petani UMKM untuk meningkatkan mutu produk pertanian sesuai

standar merupakan implementasi dari aspek penerapan standar.

Badaristan akan melakukan kegiatan penyebarluasan hasil standarisasi dan melakukan pendampingan teknis penerapan SNI di setiap provinsi terkait instrumen pertanian mulai dari aspek hulu hingga ke hilir. Dari sisi pascapanen produk pertanian yang dikelola berupa prototipe unit penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, dan produk pertanian hasil penanganan dan pengolahan primer terstandar. Standar mutu produk pertanian mengacu pada Permentan No 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian dilakukan dengan aktif menjaring umpan balik yang masif dari seluruh wilayah di Indonesia melalui perpanjangan tangan Badaristan di setiap provinsi dan mengelolanya menjadi upaya berkelanjutan untuk percepatan pengembangan dan penerapan standardisasi di sektor pertanian yang simultan dengan upaya harmonisasi dengan standar internasional.

Melalui hal tersebut, standarisasi akan menjadi faktor pengungkit yang efektif untuk mendorong produktivitas dan daya saing produk baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

3. Bagaimana kaitan tugas dan fungsi Badaristan dengan BSN? Badan Standardisasi Nasional (BSN)

merupakan Lembaga pemerintah non-Kementerian Indonesia dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di negara Indonesia. Dan salah satu fungsi BSN adalah menyusun kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional.

Badaristan merupakan Unit Eselon I di Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi terkait standarisasi lingkup instrumen pertanian, sehingga sifatnya spesifik mendukung tugas dan fungsi BSN melakukan perumusan standar di bidang pertanian sampai RSNI 3 (level K/L) untuk selanjutnya ditetapkan oleh BSN menjadi SNI. Sebelumnya, kegiatan standardisasi lingkup pertanian dilakukan oleh unit eselon 3 di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian. Dengan adanya Badaristan maka akan memudahkan BSN melakukan koordinasi satu pintu lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu Badaristan juga dapat bersinergi dengan BSN dalam melakukan pendampingan penerapan SNI di UMKM di bidang pertanian. Hal ini akan mendukung percepatan pengembangan dan penerapan SNI di bidang pertanian di seluruh Indonesia.

4. Pelaksanaan harmonisasi standar instrumen pertanian dengan negara lain merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perdagangan

ekspor-impor kedua negara dapat dilaksanakan. Namun pelaksanaan hal tersebut tidaklah mudah terutama karena sebagian besar negara sekarang sudah menerapkan persyaratan food safety dari hulu ke hilir termasuk issue lingkungan.

Apakah BSIP mempunyai target berapa Harmonisasi standar instrumen pertanian yang dapat dibuat dengan negara lain dan dalam waktu berapa lama? Strategi apa yang dilaksanakan untuk memenuhi target tersebut?

Harmonisasi standar, mengacu pada UU No 20 Tahun 2014 Pasal 13 memerlukan aspek koherensi atau keselarasan antara standar nasional dengan standar internasional, regional atau bilateral melalui adopsi standar internasional termasuk regional atau bilateral dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain. Pelaksanaan Harmonisasi standar perlu mengacu pada perlindungan kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktek adil dalam perdagangan pangan. Food safety atau keamanan pangan menjadi dasar pengembangan standar, misalnya standar yang dirumuskan oleh CODEX yang berbasis kajian risiko akan bahan tambahan pangan,



residu obat hewan dan kontaminan dalam pangan, residu pestisida, bahaya mikrobiologi dan nutrisi. Sehingga, perlu diselaraskan standar SNI dan CODEX untuk perdagangan internasional produk pertanian/pangan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat prasyarat dasar keamanan pangan dengan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP), HACCP, Food Hygiene, dan Sistem Jaminan Mutu Pangan (SJMP) dari petani produsen hingga ke unit pengolahan (pelaku usaha/UMKM) dan sampai di tangan konsumen.

Contoh berikutnya adalah harmonisasi *Good Agricultural Practices* (GAP) dengan SNI Indo-GAP dan ASEAN-GAP dimana baru selaras 44% dengan standar ASEAN agar produk pertanian Indonesia masuk ke pasar ekspor regional ASEAN. Indonesia perlu menyatukan dan mengadopsi ke-4 komponen standar ASEAN GAP (*Food Safety Module*, *Produce Quality Module*, *Worker Health, Safety and Welfare Module*, dan *Environmental Management Module*) tersebut tentu dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia.

Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan awareness isu-isu keamanan pangan terkini misal pemalsuan pangan, isu lingkungan (perubahan iklim, jejak karbon, emisi GRK), sehingga perlu ada sistem ketertelusuran dan monitoring. Dengan selarasnya standar Indo GAP dengan ASEAN GAP produk pertanian Indonesia mampu berdaya saing dan ekspor produk pertanian semakin meningkat baik di lingkup negara ASEAN maupun di negara tujuan ekspor. Pengakuan jaminan mutu Indonesia dengan beberapa negara diproses melalui bilateral arrangement dengan saling bertukar sistem dan masing-masing mempelajari dan dilakukan inspeksi, selanjutnya setelah substansi sesuai maka dilakukan kesepakatan harmonisasi *Mutual Recognition Agreement* (MRA) atau *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk perdagangan ekspor.

Cukup banyak yang perlu dibenahi dalam pengembangan dan penerapan standar pertanian, sehingga dengan hadirnya Badaristan/BSIP, kinerja standarisasi dan harmonisasi produk pertanian akan menjadi lebih terarah ke depan untuk peningkatan kepercayaan publik/pasar akan kualitas, keberterimaan dan daya saing serta akses pasar produk pertanian bertanda SNI ke pasar bilateral, regional, maupun internasional.

BSIP tentu saja perlu mengidentifikasi dengan cepat standar instrumen yang perlu diharmonisasi pada komoditas ekspor dalam perdagangan bilateral, regional, maupun internasional. Harmonisasi menjadi tantangan tersendiri dan menuntut kejelian dalam melihat peluang dan dukungan daya saing tinggi untuk dapat menjadi pemenang di pasar global. Oleh karena itu, kerja sama dengan semua pihak sangat fundamental dimulai dari konsolidasi dengan K/L terkait untuk mengetahui posisi standar instrumen pertanian saat ini, kebutuhan ke depan dan merumuskan strategi pencapaiannya.

Agricultural Industry Standardisation to Support Agricultural Product Quality and Food Security

A PISAgro Interview - Head of Research and Development Board, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia

On this occasion, PISAgro had a chance to interview with Prof. (Riset) Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. to know more about the establishment of the Agricultural Equipment Standardisation Agency (Badaristan), and the efforts made to support food security and also the quality of agricultural products in Indonesia.

1. In Presidential Regulation Number 117 of 2022 concerning the Ministry of Agriculture Article 29 it is stated that there is a newly formed Agency, namely the Agency for Standardization of Agricultural Instruments (Badaristan). Badaristan has the task of "coordinating, formulating, implementing, and maintaining, as well as harmonizing agricultural instrument standards". The output produced by Badaristan is the availability of standard agricultural instruments.

What are agricultural instrument standards? Does this task only extend to the availability of standard agricultural instruments or more than that to its application in the field?

Sustainable agriculture that is advanced, independent, modern cannot be separated from standard agricultural instruments in the form of supporting agricultural resources ranging from land and water management, agricultural tools and machinery (alsintan), plants, livestock, and food that is ready to be consumed, with quality and meets safety requirements. Referring to Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems, the scope of agricultural instruments starting from upstream to downstream includes seeds/seedlings, fertilisers, pesticides, land/soil, water, agricultural tools and machinery, agricultural post-harvest, quality of cultivated products, agricultural resources, and institutions.

Standardisation in Law Number 20 of 2014 concerning Standardisation and Conformity Assessment is the process of planning, formulating, establishing, implementing, enforcing, maintaining, supervising, and harmonizing standards that are carried out in an orderly manner and in collaboration with all Stakeholders. Meanwhile, the task of Badaristan/BSIP as stipulated in Presidential Decree No. 117 of 2022 is to coordinate, formulate, implement, and maintain, as well as harmonise agricultural instrument standards.



From that definition, standardisation of agricultural instruments is a series of comprehensive processes to provide standards for agricultural instruments which are then regulated by the authority of BSN (National Standardisation Agency) to become Indonesian National Standards (SNI). This process aims to provide support for increasing productivity, production efficiency, quality of goods, services, processes, systems and or personnel in the agricultural sector. In the end, the application of agricultural instrument standards is intended to increase product competitiveness, protect consumers, business actors, workers and the community, especially in the fields of safety, security, health and the environment.

The task of Badaristan will operationally coordinate the standardisation process with all parties. In addition to SNI, Badaristan will also formulate the concept of Minimum Technical Requirements (PTM) to support the policies of the Ministry of Agriculture. Not stopping at providing, Badaristan together with BSN will disseminate standards and encourage the implementation of standards in the community. Agricultural instrument standards, of course, need to be managed properly so that they can be fully referenced and applied, carried out an assessment of their conformity in each organisation, managed by feedback on the implementation of these standards in the field and not overlapping.



2. In Article 30 of Presidential Regulation Number 117 of 2022 it is stated that the functions of Badaristan include: "to compose technical policies for planning and programs, implementing coordination and monitoring, as well as evaluating and reporting on the implementation of coordination on the formulation, application, and maintenance, as well as harmonization of agricultural instrument standards".

Based on this function, does Badaristan provide direct guidance to farmers or companies so that the products produced can be guaranteed the quality and safety of fresh food so that they can be distributed domestically and exported?

Referring to one of the functions of Badaristan: "to compose technical policies for planning and programs, implementing coordination and monitoring, as well as evaluating and reporting on the implementation of coordination on the formulation, implementation, and maintenance, as well as harmonisation of agricultural instrument standards" indicates that Badaristan will develop a policy recommendation based on planning standardization program, then will evaluate the implementation of the standardisation programme, so that activities are always monitored in achieving its targets and issue a standard policy recommendation for agricultural instruments needed to support advanced, independent, and modern agriculture. Guidance for MSME farmers to improve the quality of agricultural products

according to standards is the implementation of aspects of standard application.

Badaristan will carry out activities to disseminate standardisation results and provide technical assistance for the application of SNI in each province related to agricultural instruments from upstream to downstream aspects. From the post-harvest side, agricultural products are managed in the form of prototypes of storage, processing, transportation, and standardised primary processing and handling agricultural products. The quality standard of agricultural products refers to the Minister of Agriculture Regulation No. 20 of 2010 concerning the Agricultural Food Quality Assurance System. Assistance in the application of agricultural instrument standards is carried out by actively soliciting massive feedback from all regions in Indonesia through the extension of Badaristan in each province and managing it as a continuous effort to accelerate the development and application of standardisation in the agricultural sector simultaneously with harmonisation efforts with international standards.

Through this, standardisation will be an effective lever to boost productivity and product competitiveness, both for meeting domestic and export needs.

3. How are the duties and functions of Badaristan related to BSN? The National Standardisation Board

(BSN) is a non-Ministry of Indonesian government agency with the main task of carrying out government duties in the field of standardisation and conformity assessment in Indonesia. And one of the functions of BSN is to formulate national policies in the field of national standardisation.

Badaristan is an Echelon I Unit in the Ministry of Agriculture which has duties and functions related to standardisation of the scope of agricultural instruments, so that its specific nature supports the task of BSN in formulating standards in agriculture up to RSNI 3 (K/L level) to be further determined by BSN to become SNI. Previously, standardisation activities in the agricultural scope were carried out by echelon 3 units in several Technical Implementation Units (UPT) of the Ministry of Agriculture. With the existence of Badaristan, it will be easier for BSN to coordinate one door within the scope of the Ministry of Agriculture. In addition, Badaristan can also synergise with BSN in assisting the application of SNI in MSMEs in the agricultural sector. This will support the acceleration of the development and application of SNI in agriculture throughout Indonesia.

4. The implementation of the agricultural instrument standards harmonisation with other

countries is a requirement that must be met so that the export-import trade of the two countries can be carried out. However, implementing this is not easy, especially since most countries have now implemented food safety requirements from upstream to downstream, including environmental issues.

Does BSIP have a target for how much harmonisation of agricultural instrument standards can be made with other countries and in how long? What strategies are implemented to meet these targets?

Harmonisation of standards, referring to Law No. 20 of 2014 Article 13 requires aspects of coherence or alignment between national standards and international, regional or bilateral standards through the adoption of international standards including regional or bilateral by considering national interests to deal with global trade; or modification of international standards adapted to differences in climate, environment, geology, geography, technological capabilities, and other specific conditions. The implementation of harmonisation of standards needs to refer to the protection of consumer health and ensure fair practices in the food trade. Food safety is the basis for developing standards, for example the standards formulated by



CODEX based on risk studies of food additives, veterinary drug residues and contaminants in food, pesticide residues, microbiological and nutritional hazards. Thus, it is necessary to harmonize SNI and CODEX standards for international trade in agricultural/food products. The steps that need to be taken are to strengthen the basic prerequisites for food safety by implementing Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), HACCP, Food Hygiene, and a Food Quality Assurance System (SJMP) from producer farmers to processing units (business actors/MSMEs) and reaches consumers.

The next example is the harmonisation of Good Agricultural Practices (GAP) with SNI Indo-GAP and ASEAN-GAP which is only 44% aligned with ASEAN standards so that Indonesian agricultural products enter the ASEAN regional export market. Indonesia needs to unite and adopt the 4 components of the ASEAN GAP standard (Food Safety Module, Produce Quality Module, Worker Health, Safety and Welfare Module, and Environmental Management Module).

In addition, Indonesia needs to increase awareness of the latest food safety issues, such as food counterfeiting, environmental issues (climate change, carbon footprint, GHG emissions), so there needs to be a traceability and monitoring system. With the alignment of Indo GAP standards with ASEAN GAP Indonesian agricultural products are able to be competitive and exports of agricultural products are increasing both in the scope of ASEAN countries and in export destination countries. Recognition of Indonesia's quality assurance with several countries is processed through bilateral arrangements by exchanging systems and each study and inspection is carried out, then after the substance is in accordance, a harmonization agreement of Mutual Recognition Agreement (MRA) or Memorandum of Understanding for export trade is carried out.

There is quite a lot that needs to be addressed in the development and application of agricultural standards, so that with the presence of Badaristan/BSIP, the performance of standardisation and harmonisation of agricultural products will be more focused in the future to increase public/market confidence in quality, acceptability and competitiveness as well as market access for marked agricultural products. SNI to bilateral, regional, and international markets.

BSIP, of course, needs to quickly identify standard instruments that need to be harmonised with export commodities in bilateral, regional and international trade. Harmonisation is a challenge in itself and requires carefulness in seeing opportunities and high competitiveness support to be a winner in the global market. Therefore, cooperation with all parties is very fundamental starting from consolidation with related Ministries/Agencies to determine the current standard position of agricultural instruments, future needs and formulate strategies for achieving them.



 www.pisagro.org

 Pisagro_secretariat

   PISAgro

PISAgro Secretariat
contact@pisagro.org

Insan Syafaat
isyafaat@pisagro.org

Sinarmas Land Plaza Tower 2
22th Floor, JI MH. Thamrin Kav. 51
Jakarta 10350, Indonesia

T. +62 21 5047 8888

F. +62 21 5043 8888